

REKAP LHKPN PEJABAT BIRO EKBANG SETDA PROVINSI BANTEN

No	Unit Kerja	Bidang	Jabatan-Unit Kerja- Subunit Kerja	Jenis Laporan	Media Pelaporan	Nama	NIP	Status Jabatan	Status LHKPN	Status Pelaporan	Sub Unit Kerja	Tahun WL
1	SEKRETARIAT DAERAH	EKSEKUTIF	KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Periodik	e - filling	Ahmad syaukani	19740422 199303 1 001	Utama	Diumumkan lengkap	Sudah Lapor	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROV BANTEN	2019
2	SEKRETARIAT DAERAH	EKSEKUTIF	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN ANALISA DATA	Periodik	e - filling	SYAEPUDDIN AL ZEIN	19631225 198903 1 005	Utama	Diumumkan lengkap	Sudah Lapor	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROV BANTEN	2020
3	SEKRETARIAT DAERAH	EKSEKUTIF	KEPALA BAGIAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Periodik	e - filling	<u>YADI MULYADI</u>	19780919 199803 1 015	Utama	Diumumkan lengkap	Sudah Lapor	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROV BANTEN	2020
4	SEKRETARIAT DAERAH	EKSEKUTIF	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	Periodik	e - filling	<u>ABDUL CHALIK LUBIS</u>	19631225 198903 1 005	Utama	Diumumkan lengkap	Sudah Lapor	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROV BANTEN	2020
5	SEKRETARIAT DAERAH	EKSEKUTIF	KEPALA SUB BAGIAN ANALISA DATA KEGIATAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Periodik	e - filling	<u>ICHWANUDIN M</u>	19790718 200212 1 002	Utama	Diumumkan lengkap	Sudah Lapor	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROV BANTEN	2020
6	SEKRETARIAT DAERAH	EKSEKUTIF	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Periodik	e - filling	HENDRO FERRY HANDOKO	19741021 200112 1 003	Utama	Diumumkan lengkap	Sudah Lapor	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROV BANTEN	2020
7	SEKRETARIAT DAERAH	EKSEKUTIF	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	Periodik	e - filling	R. SURYA AGUSTINA	19650812 200212 2 006	Utama	Diumumkan lengkap	Sudah Lapor	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROV BANTEN	2020



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



memenuhi kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **8 Juli 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.